



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI V DPR RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024
(31 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN 15 JANUARI 2024)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 27 September 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 Desember 2023, berjumlah 26 (dua puluh enam) hari kerja atau 36 (tiga puluh enam) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Januari 2024, berjumlah 26 (dua puluh enam) hari kerja atau 41 (empat puluh satu) hari kalender.

Kegiatan Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 difokuskan pada kegiatan Anggaran dan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di komisi dan melakukan kunjungan kerja spesifik serta kunjungan kerja reses Masa Persidangan II tahun Sidang 2023-2024 untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI ANGGARAN

Dalam fungsi Anggaran Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI berdasarkan jadwal pembahasan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program/kegiatan TA 2024.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, RDPU dan kunjungan spesifik dalam rangka peninjauan infrastruktur dan transportasi, serta melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat intern Komisi V DPR RI, Rabu, 1 November 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan II Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 31 Oktober sampai dengan 5 Desember 2023.

BIDANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN

RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Selasa, 7 November 2023, agenda Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Membahas Program/kegiatan TA 2024 dan Lain-lain, memutuskan :
 - a. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk mempercepat realisasi program dan kegiatan TA 2023, dimana capaian per 6 November 2023, sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian Perhubungan	68,63 %	73,18 %

- b. Komisi V DPR RI dapat menyetujui Pergeseran Alokasi Anggaran TA 2024 pada Unit Organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2024 Tanggal 12 September 2023	ALOKASI ANGGARAN TA 2024 (SETELAH PERGESERAN) Tanggal 7 November 2023
Kementerian Perhubungan		38.604.826.459	38.604.826.459
1.	Sekretariat Jenderal	649.493.173	649.493.173
2.	Inspektorat Jenderal	112.424.822	112.424.822
3.	Ditjen Perhubungan Darat	6.664.310.961	6.664.310.350
4.	Ditjen Perhubungan Laut	9.538.475.833	9.550.026.444
5.	Ditjen Perhubungan Udara	7.709.626.236	7.709.626.373
6.	Ditjen Perkeretaapian	9.694.877.472	9.683.327.472
7.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	3.708.986.611	3.708.986.474
8.	Badan Kebijakan Transportasi	196.457.340	196.457.340
9.	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	330.174.011	330.174.011

- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk:
- 1) meningkatkan sistem monitoring dan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran TA 2023 di masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
 - 2) memaksimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di semua subsektor perhubungan.
 - 3) meningkatkan pengawasan dan penertiban terhadap program *Buy The Service* (BTS), layanan Terminal Umum serta Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).
 - 4) menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI.
2. Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Senin, 20 November 2023 agenda Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Membahas Program/kegiatan TA 2024 dan Lain-lain, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR atas capaian realisasi program dan kegiatan TA 2023, dimana capaian per 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian PUPR	57,49 %	60,01 %

- Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar mempercepat realisasi TA 2023 untuk mencapai prognosis penyerapan sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.
- b. Komisi V DPR RI menyetujui Realokasi Anggaran Antar Program dan/atau Antar Fungsi Kementerian PUPR TA 2023 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	Unit Organisasi/ Fungsi/Program	PAGU ANGGARAN TA 2023	REALOKASI ANGGARAN TA 2023		PAGU SETELAH REALOKASI
			Kurang (-)	Tambah (+)	
1.	Direktorat Jenderal Cipta Karya				
a.	Perumahan dan Fasilitas Umum	26.261.386.811	1.376.820.722	-	24.884.566.089
	- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	25.323.034.893	1.376.820.722	-	23.946.214.171
	- Program Dukungan Manajemen	938.351.918	-	-	938.351.918
b.	Pendidikan	3.613.886.481	-	629.722.500	4.243.608.981

NO	Unit Organisasi/ Fungsi/Program	PAGU ANGGARAN TA 2023	REALOKASI ANGGARAN TA 2023		PAGU SETELAH REALOKASI
			Kurang (-)	Tambah (+)	
	- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.613.886.48 1	-	629.722.5 00	4.243.608.98 1
2.	Direktorat Jenderal Bina Marga				
a.	Ekonomi				
	- Program Infrastruktur Konektivitas	69.915.735.1 08	-	747.098.2 22	70.662.833.3 30

c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:

- 1) meningkatkan sistem monitoring dan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran TA 2023 di masing-masing Unit Organisasi Eselon I.
- 2) mempercepat realisasi program infrastruktur berbasis masyarakat TA 2023;
- 3) merealisasikan penambahan anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat TA 2024;
- 4) menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi V DPR RI.

3. Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kakorlantas Polri dan *Stakeholders* Terkait, Selasa, 21 November 2023, agenda membahas mengenai Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, memutuskan :

- a. Komisi V DPR RI mendukung rencana kebijakan dan operasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang dilakukan Pemerintah dan operator transportasi nasional dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan pelayanan prima kepada masyarakat di semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api.
- b. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan operator transportasi nasional agar dalam penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memastikan kelaikan operasi (*ramp check*) sarana dan prasarana di semua moda transportasi, termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimum;
 - 2) melakukan tindakan preventif keselamatan dan kelancaran pada titik-titik krusial dan daerah wisata, termasuk pada perlintasan sebidang;
 - 3) mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan *delay management*;

- 4) mempercepat penyelesaian preservasi di ruas Jalan Nasional dan Jalan Tol;
 - 5) memastikan skema penguraian kemacetan dengan melakukan sinergi bersama pemerintah daerah setempat;
 - 6) meningkatkan diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca ekstrim;
 - 7) memastikan kesiapan personil dan peralatan untuk mengantisipasi kecelakaan dan potensi bencana;
 - 8) memastikan kesiapan dengan melakukan simulasi apabila terjadi keadaan darurat.
- c. Komisi V DPR RI akan mengadakan Rapat lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait berkenaan dengan penanganan kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL).
4. Rapat Kerja dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Selasa, 28 November 2023, Membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Membahas Program/kegiatan TA 2024, dan Lain-lain, memutuskan :
- a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi atas capaian realisasi program dan kegiatan TA 2023, dimana capaian per 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Kementerian	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	67,17%	73,61%

Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar mengambil upaya strategis untuk mempercepat penyerapan dalam mencapai prognosis anggaran TA 2023 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

- b. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam mempercepat realisasi program dan anggaran di TA 2024.
- c. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pemanfaatan dana desa, pengembangan wisata desa, serta pengembangan kawasan ekonomi pedesaan menuju desa yang maju dan mandiri.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

1. Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kepala BMKG, Rabu, 8 November 2023, Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 s.d 31 Oktober 2023, Membahas program/kegiatan Tahun Anggaran 2024, Membahas tentang perubahan iklim global dan antisipasi cuaca ekstrim (BMKG), Lain-lain.memutuskan :

- a. Komisi V DPR RI memahami penjelasan BMKG dan BNPP/Basarnas atas capaian realisasi program dan kegiatan TA 2023 per 31 Oktober 2023, sebagai berikut:

No.	Lembaga	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1.	BMKG	65,07 %	75,67 %
2.	BNPP/Basarnas	77,51 %	83,02 %

Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas agar mempercepat realisasi TA 2023 untuk mencapai prognosis penyerapan sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

- b. Komisi V DPR RI meminta BMKG dan BNPP/Basarnas untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG serta pelaksanaan operasi SAR.
- c. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk melakukan penguatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim global, meningkatkan literasi iklim kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, serta penguatan Sumber Daya Manusia BMKG.
- d. Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk meningkatkan pembinaan potensi SAR dan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesiapsiagaan terhadap bencana.

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI

1. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Mahasiswa Kampus Merdeka, Selasa, 14 November 2023 dengan agenda penjelasan terkait Pelaksanaan Fungsi Anggaran Komisi V DPR RI oleh Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady.
2. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Mahasiswa Kampus Merdeka, Kamis, 23 November 2023 dengan agenda penjelasan terkait lika-liku menjadi Anggota DPR RI oleh Anggota Komisi V DPR RI Drs. Mulyadi, M.M. A.
3. Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perkumpulan Cluster Kotawisata Cibubur, Kamis, 23 November 2023 dengan agenda menerima aspirasi terkait dengan permasalahan pencemaran sungai Cileungsi yang mengalir dari Wilayah Kab Bogor melalui Kota Bekasi sampai Kab Bekasi.

KUNJUNGAN KERJA

1. Kunjungan Kerja Spesifik

Tanggal 16-18 November 2023 melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke :

- Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, meninjau penataan Kawasan Candi Muara Takus.
- Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, meninjau Terminal tipe A Cepu dan pengelolaan serta pemanfaatan Bandara Ngloram;
- Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, meninjau persiapan penanganan infrastruktur jalan di Simpang Rampak;

- 2. Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke :**
- a. Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan tanggal 6 - 10 Desember 2023;
 - b. Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya tanggal 6 - 10 Desember 2023;
 - c. Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tanggal 6 - 10 Desember 2023.

**Jakarta, Desember 2023
Kabagset komisi V DPR RI,**

**Nunik Prihatin Budiastuti, SH.
NIP. 19691202 199803 2 002**